



SALINAN

GOVERNOR PAPUA BARAT DAYA
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF PAPUA BARAT DAYA
NUMBER 1 YEAR 2025

ABOUT

REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET YEAR REGIONAL BUDGET 2025

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD Papua Barat Daya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6831);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Papua Barat Daya;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 565);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PAPUA BARAT DAYA

Dan

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 1.722.942.015.206,00 (Satu trilyun tujuh ratus dua puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima belas ribu dua ratus enam rupiah), terdiri atas Pendapatan, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan	: Rp. 206.345.812.361,00
b. Belanja daerah	: Rp. 1. 722.942.015.296,00
Defisit	: Rp. 8.576.375.845,00
c. Pembiayaan daerah	
1. penerimaan	: Rp. 8.576.375.845,00
2. pengeluaran	: Rp. 00 (nol)
Pembiayaan Netto	: Rp. 8.576.375.845,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun Berkenan (SILPA)	: Rp.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.722.942.015.206,00 (Satu Trilyun Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Belas Ribu Dua Ratus Enam Rupiah) yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	: Rp. 206.345.812.361,00
b. Pendapatan Transfer	: Rp. 1.508.019.827.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	: Rp. 0,00 (nol)

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 206.345.812.361,00 (Dua Ratus Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah; dan
 - b. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.177.828.712.361,00 (Seratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.517.100.000,00 (Dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh belas juta seratus ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.508.019.827.000,00 (Satu Trilyun Lima ratus delapan Milyard Sembilan belas juta Delapan ratus dua puluh Tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.508.019.827.000,00 (Satu trilyun Lima ratus delapan Milyard Sembilan belas Juta Delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.722.942.015.206,00 (Satu Trilyun Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Belas Ribu Dua Ratus Enam Rupiah), yang terdiri atas belanja:

- a. operasional;
- b. modal;
- c. tidak terduga; dan
- d. transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.108.103.032.356,00 (Satu trilyun seratus delapan milyar seratus tiga juta tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 308.682.588.054,00 (Tiga ratus delapan milyar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 620.461.251.432,25 (Enam ratus dua puluh milyar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupia dua puluh lima Sen).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. Rp. 0,00 (nol).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 158.469.192.869,75 (Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.490.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 367.609.308.881,00 (Tiga ratus enam puluh tujuh milyar enam ratus sembilan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf diencanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.306.895.390,00 (Dua puluh tiga milyar tiga ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 57.400.268.272,00 (Lima puluh tujuh milyar empat ratus juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 282.431.866.969,00 (Dua ratus delapan puluh dua milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.270.278.250,00 (Empat milyar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.420.790.956,00 (delapan milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 238.808.883.013,00 (Dua ratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga belas rupiah), yang terdiri atas belanja:
 - a. Bagi hasil; dan
 - b. Bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 109.324.591.713,00 (Seratus sembilan milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.129.484.291.300,00 (Seratus dua puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 8.576.375.845,00 (Delapan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.576.375.845,00 (Delapan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.576.375.845,00 (Delapan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah)
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga milyar).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.8.576.375.845,00 (Delapan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 8.576.375.845,00 (Delapan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 14 Januari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 14 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

CAP/TTD

JHONI WAY

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,



Dr. Anace Nauw, S.H., M.H.
Jabatan Tk. I (IV/b)
NIP. 19721116 200212 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
DAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA,
DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	206.345.812.361,00
4.1.01	Pajak Daerah	177.828.712.361,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	28.517.100.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.508.019.827.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.508.019.827.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.714.365.639.361,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.108.103.032.356,00
5.1.01	Belanja Pegawai	307.932.588.054,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	621.211.251.432,25
5.1.05	Belanja Hibah	158.469.192.869,75
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.490.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	367.609.308.881,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.306.895.390,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.400.268.272,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	282.431.866.969,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.270.278.250,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.420.790.956,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.420.790.956,00
5.4	BELANJA TRANSFER	238.808.863.013,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	109.324.591.713,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	129.484.291.300,00
	Jumlah Belanja	1.722.942.015.206,00

	Total Surplus/(Defisit)	-8.576.375.845,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	8.576.375.845,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.576.375.845,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	8.576.375.845,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Pembiayaan Netto	8.576.375.845,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,
Dr. Anas Nauw, S.H., M.H.
Gedung Tk. I (IV/b)
NIP. 6921116 200212 2 001



Lampiran II :Peraturan Daerah

Nomor : 1 TAHUN 2025

Tanggal : 14 Januari 2025

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode		Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	349.288.431.961,00	296.469.651.137,00	0,00	0,00	645.758.083.098,00
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0,00	169.746.076.704,00	4.524.000.000,00	0,00	0,00	174.270.076.704,00
1	01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	169.746.076.704,00	4.524.000.000,00	0,00	0,00	174.270.076.704,00
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	0,00	105.318.878.052,00	137.000.000,00	0,00	0,00	105.455.878.052,00
1	02	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	105.318.878.052,00	137.000.000,00	0,00	0,00	105.455.878.052,00
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	23.419.869.709,00	290.768.931.137,00	0,00	0,00	314.188.800.846,00
1	03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0,00	23.419.869.709,00	290.768.931.137,00	0,00	0,00	314.188.800.846,00
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	5.006.840.000,00	993.160.000,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00
1	04	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0,00	5.006.840.000,00	993.160.000,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	16.301.414.139,00	0,00	0,00	0,00	16.301.414.139,00
1	05	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PEMANGGULANGAN BENCA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	16.301.414.139,00	0,00	0,00	0,00	16.301.414.139,00
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	29.495.353.357,00	46.560.000,00	0,00	0,00	29.541.913.357,00
1	06	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	29.495.353.357,00	46.560.000,00	0,00	0,00	29.541.913.357,00

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2		26.517.100.000,00	164.609.173.793,00	19.006.567.304,00	0,00	0,00	183.615.741.097,00
2	07	0,00	30.705.823.437,00	660.534.000,00	0,00	0,00	31.366.357.437,00
2	07	0,00	30.705.823.437,00	660.534.000,00	0,00	0,00	31.366.357.437,00
2	08	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
2	08	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
2	09	26.517.100.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
2	09	26.517.100.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
2	10	0,00	1.221.300.000,00	28.700.000,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00
2	10	0,00	1.221.300.000,00	28.700.000,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00
2	11	0,00	30.417.590.193,00	49.870.000,00	0,00	0,00	30.467.460.193,00
2	11	0,00	30.417.590.193,00	49.870.000,00	0,00	0,00	30.467.460.193,00
2	12	0,00	13.509.190.718,00	120.547.400,00	0,00	0,00	13.629.738.118,00
2	12	0,00	13.509.190.718,00	120.547.400,00	0,00	0,00	13.629.738.118,00
2	13	0,00	4.842.559.600,00	1.567.614.304,00	0,00	0,00	6.410.173.904,00
2	13	0,00	4.842.559.600,00	1.567.614.304,00	0,00	0,00	6.410.173.904,00

Kode		Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	2.736.415.590,00	0,00	0,00	0,00	2.736.415.590,00
2	14	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	2.736.415.590,00	0,00	0,00	0,00	2.736.415.590,00
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	0,00	11.044.696.768,00	15.500.000.000,00	0,00	0,00	26.544.696.768,00
2	15	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	11.044.696.768,00	15.500.000.000,00	0,00	0,00	26.544.696.768,00
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	18.605.102.437,00	45.360.000,00	0,00	0,00	18.650.462.437,00
2	16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	0,00	18.605.102.437,00	45.360.000,00	0,00	0,00	18.650.462.437,00
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0,00	12.674.750.773,00	98.941.600,00	0,00	0,00	12.773.692.373,00
2	17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	12.674.750.773,00	98.941.600,00	0,00	0,00	12.773.692.373,00
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	14.120.457.644,00	0,00	0,00	0,00	14.120.457.644,00
2	18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	14.120.457.644,00	0,00	0,00	0,00	14.120.457.644,00
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	0,00	15.058.584.714,00	0,00	0,00	0,00	15.058.584.714,00
2	19	DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0,00	15.058.584.714,00	0,00	0,00	0,00	15.058.584.714,00
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
2	20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
2	21	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0,00	6.372.701.919,00	935.000.000,00	0,00	0,00	7.307.701.919,00

Kode		Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000						
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	6.372.701.919,00	935.000.000,00	0,00	0,00	7.307.701.919,00
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	0,00	94.903.937.416,00	45.019.801.240,00	0,00	0,00	139.923.738.656,00
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	49.519.660.231,00	18.153.223.200,00	0,00	0,00	67.672.883.431,00
3	25	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	49.519.660.231,00	18.153.223.200,00	0,00	0,00	67.672.883.431,00
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0,00	9.293.100.500,00	0,00	0,00	0,00	9.293.100.500,00
3	26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0,00	9.293.100.500,00	0,00	0,00	0,00	9.293.100.500,00
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	0,00	7.833.406.000,00	16.594.000,00	0,00	0,00	7.850.000.000,00
3	27	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	7.833.406.000,00	16.594.000,00	0,00	0,00	7.850.000.000,00
3	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	0,00	5.917.537.355,00	1.172.217.490,00	0,00	0,00	7.089.754.845,00
3	28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	0,00	5.917.537.355,00	1.172.217.490,00	0,00	0,00	7.089.754.845,00
3	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	3.392.734.000,00	25.607.266.000,00	0,00	0,00	29.000.000.000,00
3	29	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	3.392.734.000,00	25.607.266.000,00	0,00	0,00	29.000.000.000,00
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0,00	8.000.456.250,00	17.543.750,00	0,00	0,00	8.018.000.000,00
3	30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	8.000.456.250,00	17.543.750,00	0,00	0,00	8.018.000.000,00
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0,00	5.999.999.880,00	0,00	0,00	0,00	5.999.999.880,00
3	31	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	5.999.999.880,00	0,00	0,00	0,00	5.999.999.880,00
3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0,00	4.947.043.200,00	52.956.800,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00

Kode		Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3	32	2.07.3.29.3.32.06.0000			DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	0,00	5.000.000.000,00
4			0,00	4.947.043.200,00	52.956.800,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
4	01		0,00	322.178.814.331,00	6.276.186.800,00	0,00	0,00	328.455.001.131,00
4	01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	222.948.458.900,00	6.276.186.800,00	0,00	0,00	229.224.645.700,00
4	01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	205.974.645.700,00	5.750.000.000,00	0,00	0,00	211.724.645.700,00
4	01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
4	01	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI KHUSUS, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	2.304.000.000,00	196.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
4	01	BIRO ORGANISASI	0,00	2.325.938.600,00	174.061.400,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
4	01	BIRO HUKUM	0,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
4	01	BIRO UMUM	0,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
4	01	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH	0,00	2.343.874.600,00	156.125.400,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
4	01	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	0,00	99.230.355.431,00	0,00	0,00	0,00	99.230.355.431,00
4	02	SEKRETARIAT DPRD	0,00	99.230.355.431,00	0,00	0,00	0,00	99.230.355.431,00
4	02	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT DAYA	0,00	106.940.352.691,00	626.638.400,00	8.420.790.956,00	238.808.883.013,00	354.796.665.060,00
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.687.848.539.361,00	18.750.997.916,00	11.744.000,00	0,00	0,00	18.762.741.916,00
5	01	PERENCANAAN	0,00	18.750.997.916,00	11.744.000,00	0,00	0,00	18.762.741.916,00
5	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	0,00	70.131.442.753,00	516.894.400,00	8.420.790.956,00	238.808.883.013,00	317.878.011.122,00
5	02	KEUANGAN	1.687.848.539.361,00	70.131.442.753,00	516.894.400,00	8.420.790.956,00	238.808.883.013,00	317.878.011.122,00
5	02	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	1.687.848.539.361,00	15.857.912.022,00	98.000.000,00	0,00	0,00	15.955.912.022,00
5	03	KEPEGAWAIAN	0,00					

Kode		Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000						
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	15.857.912.022,00	98.000.000,00	0,00	0,00	15.955.912.022,00
5	04							
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000						
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
5	05							
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00
5	05	5.01.5.05.0.00.17.0000						
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	0,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00
6								
		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	21.613.710.897,00	210.464.000,00	0,00	0,00	21.824.174.897,00
6	01							
		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	21.613.710.897,00	210.464.000,00	0,00	0,00	21.824.174.897,00
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000						
		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	21.613.710.897,00	210.464.000,00	0,00	0,00	21.824.174.897,00
8								
		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	11.395.057.536,00	0,00	0,00	0,00	11.395.057.536,00
8	01							
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	11.395.057.536,00	0,00	0,00	0,00	11.395.057.536,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000						
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	11.395.057.536,00	0,00	0,00	0,00	11.395.057.536,00
9								
		UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	0,00	74.347.107.462,00	0,00	0,00	0,00	74.347.107.462,00
9	03							
		KEKHUSUSAN PAPUA BARAT	0,00	74.347.107.462,00	0,00	0,00	0,00	74.347.107.462,00
9	03	9.03.0.00.0.00.01.0000						
		SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT DAYA	0,00	37.173.553.731,00	0,00	0,00	0,00	37.173.553.731,00
9	03	9.03.0.00.0.00.01.0000						
		SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT DAYA	0,00	37.173.553.731,00	0,00	0,00	0,00	37.173.553.731,00
2								
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	09							
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran III : Peraturan Daerah
Nomor : 1 TAHUN 2025
Tanggal : 14 Januari 2025

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.714.365.639.361,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	206.345.812.361,00	
4.1.01	Pajak Daerah	177.828.712.361,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	28.517.100.000,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.508.019.827.000,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.508.019.827.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
Unit Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 9.03.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.490.000,00	
PEMBIAYAAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	8.576.375.845,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.576.375.845,00	

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,
Dr. Anace Nauw, S.H., M.H.
Penganda Tk. I (IV/b)
RPPMUK 73116 200212 2 001



Lampiran IV : Peraturan Daerah
Nomor : 1 TAHUN 2025
Tanggal : 14 Januari 2025

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
1	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
2	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
3	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	
4	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Belanja (Rp)						Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024							
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	9.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			0	10	463.232.000,00	0,00	0,00	0,00	463.232.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	9.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
901	9.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan Laporan	70.544.000,00	0,00	0,00	0,00	70.544.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
902	9.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	275.688.000,00	0,00	0,00	0,00	275.688.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	9.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
903	9.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	1.050.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
904	9.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.490.000,00	0,00	0,00	0,00	5.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

PEMERINTAH PROVINSI

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD



Lampiran V : Peraturan Daerah

Nomor : 1 TAHUN 2025

Tanggal : 14 Januari 2025

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN

ANGGARAN 2025

Kode			Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1			PELAYANAN UMUM					
1	01	1	01	Pendidikan	15.269.939.928,00	784.000.000,00	0,00	16.053.939.928,00
1	01	1	02	Kesehatan	9.674.912.022,00	87.000.000,00	0,00	9.761.912.022,00
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.809.794.656,00	158.836.200,00	0,00	10.968.630.856,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	8.428.950.139,00	0,00	0,00	8.428.950.139,00
1	01	1	06	Sosial	9.193.797.437,00	46.560.000,00	0,00	9.240.357.437,00
1	01	2	07	Tenaga Kerja	8.703.823.437,00	62.534.000,00	0,00	8.766.357.437,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	29.417.590.193,00	49.870.000,00	0,00	29.467.460.193,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.509.190.718,00	120.547.400,00	0,00	13.629.738.118,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.842.559.600,00	1.567.614.304,00	0,00	6.410.173.904,00
1	01	2	15	Perhubungan	8.280.544.768,00	0,00	0,00	8.280.544.768,00
1	01	2	16	Komunikasi dan Informatika	7.858.997.437,00	45.360.000,00	0,00	7.904.357.437,00
1	01	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.674.750.653,00	98.941.600,00	0,00	10.773.692.253,00
1	01	2	18	Penanaman Modal	7.120.457.644,00	0,00	0,00	7.120.457.644,00
1	01	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	8.351.685.214,00	0,00	0,00	8.351.685.214,00
1	01	2	20	Statistik	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
1	01	3	25	Kelautan dan Perikanan	14.952.760.231,00	103.023.200,00	0,00	15.055.783.431,00
1	01	4	01	Sekretariat Daerah	220.981.758.900,00	6.242.886.800,00	0,00	227.224.645.700,00
1	01	4	02	Sekretariat DPRD	99.230.355.431,00	0,00	0,00	99.230.355.431,00
1	01	5	01	Perencanaan	18.750.997.916,00	11.744.000,00	0,00	18.762.741.916,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	01	5	02	Keuangan	70.131.442.753,00	516.894.400,00	8.420.790.956,00	238.808.883.013,00	317.878.011.122,00
1	01	5	03	Kepegawaian	15.857.912.022,00	98.000.000,00	0,00	0,00	15.955.912.022,00
1	01	5	04	Pendidikan dan Pelatihan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
1	01	5	05	Penelitian dan Pengembangan	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00
1	01	6	01	Inspektorat	21.613.710.897,00	210.464.000,00	0,00	0,00	21.824.174.897,00
1	01	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	11.395.057.536,00	0,00	0,00	0,00	11.395.057.536,00
1	01	9	03	Papua Barat	37.173.553.731,00	0,00	0,00	0,00	37.173.553.731,00
2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN					
2	03	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	7.872.464.000,00	0,00	0,00	0,00	7.872.464.000,00
2	03	1	06	Sosial	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
2	03	4	01	Sekretariat Daerah	1.966.700.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
3				EKONOMI					
3	04	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.998.611.053,00	282.417.000.257,00	0,00	0,00	289.415.611.310,00
3	04	2	07	Tenaga Kerja	22.002.000.000,00	598.000.000,00	0,00	0,00	22.600.000.000,00
3	04	2	09	Pangan	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
3	04	2	15	Perhubungan	2.764.152.000,00	15.500.000.000,00	0,00	0,00	18.264.152.000,00
3	04	2	16	Komunikasi dan Informatika	10.746.105.000,00	0,00	0,00	0,00	10.746.105.000,00
3	04	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.000.000.120,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.120,00
3	04	2	18	Penanaman Modal	7.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00
3	04	2	21	Persandian	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
3	04	3	25	Kelautan dan Perikanan	34.566.900.000,00	18.050.200.000,00	0,00	0,00	52.617.100.000,00
3	04	3	27	Pertanian	7.833.406.000,00	16.594.000,00	0,00	0,00	7.850.000.000,00
3	04	3	28	Kehutanan	5.917.537.355,00	1.172.217.490,00	0,00	0,00	7.089.754.845,00
3	04	3	29	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.392.734.000,00	25.607.266.000,00	0,00	0,00	29.000.000.000,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Tertuga	Transfer	
3	04	3	30	Perdagangan	8.000.456.250,00	17.543.750,00	0,00	0,00	8.018.000.000,00
3	04	3	31	Perindustrian	5.999.999.880,00	0,00	0,00	0,00	5.999.999.880,00
4				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP					
4	05	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000.000,00
4	05	2	10	Pertanahan	1.221.300.000,00	28.700.000,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00
4	05	2	11	Lingkungan Hidup	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
5				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					
5	06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.011.464.000,00	8.193.094.680,00	0,00	0,00	9.204.558.680,00
5	06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.006.840.000,00	993.160.000,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00
6				KESEHATAN					
6	07	1	02	Kesehatan	95.643.966.030,00	50.000.000,00	0,00	0,00	95.693.966.030,00
6	07	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.736.415.590,00	0,00	0,00	0,00	2.736.415.590,00
7				PARIWISATA					
7	08	3	26	Parwisata	9.293.100.500,00	0,00	0,00	0,00	9.293.100.500,00
8				PENDIDIKAN					
8	10	1	01	Pendidikan	154.476.136.776,00	3.740.000.000,00	0,00	0,00	158.216.136.776,00
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	6.706.899.500,00	0,00	0,00	0,00	6.706.899.500,00
8	10	2	22	Kebudayaan	6.372.701.919,00	935.000.000,00	0,00	0,00	7.307.701.919,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL					
9	11	1	06	Sosial	20.001.555.920,00	0,00	0,00	0,00	20.001.555.920,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
9	11	3	32	Transmigrasi	4.947.043.200,00	52.956.800,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
				TOTAL	1.108.103.032.356,00	367.609.308.381,00	8.420.790.956,00	238.808.883.013,00	1.722.942.015.206,00



Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
A SPM Bidang Pendidikan			
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2.804.907.845,00
Total			2.804.907.845,00
2.	Literasi dan Numerasi	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	3.509.504.200,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	1.154.387.580,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	200.000.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	1.768.868.201,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	5.524.207.000,25
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	2.559.245.399,75
Total			14.716.212.381,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan			17.521.120.226,00
B SPM Bidang Kesehatan			
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.212.863.000,00
Total			1.212.863.000,00
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	500.000.000,00
Total			500.000.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan			1.712.863.000,00
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	900.000.000,00
Total			900.000.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			900.000.000,00
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1.000.000.000,00
Total			1.000.000.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			1.000.000.000,00
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Pelayanana Ketenteraman dan Keteriban Umum Provinsi	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	200.000.000,00
		Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	500.000.000,00
Total			700.000.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			700.000.000,00
F SPM Bidang Sosial			
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	0,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	200.000.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	200.000.000,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	0,00
		Penyediaan Permakanan	100.000.000,00
		Penyediaan Sandang	0,00
Total			500.000.000,00
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	0,00
		Penyediaan Makanan	100.000.000,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	0,00
		Penyediaan Sandang	0,00
Total			100.000.000,00
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	0,00
		Penyediaan Alat Bantu	0,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	0,00
		Penyediaan Permakanan	100.000.000,00
		Penyediaan Sandang	0,00
Total			100.000.000,00
4.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Penyediaan Permakanan	0,00
		Penyediaan Sandang	0,00
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	0,00
Total			0,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			700.000.000,00



Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	16.053.939.928,00
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	216.849.867.010,00	157.666.136.776,00
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	35.000.000.001,00	0,00
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	0,00	550.000.000,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	9.761.912.022,00
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	148.088.510.004,00	78.962.255.990,00
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	14.000.000.002,00	16.731.710.040,00
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	800.000.000,00	0,00
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.500.000.000,00	0,00
1	02	07	PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	1.500.000.000,00	0,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	10.968.630.856,00
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	90.000.000.000,00	12.392.096.000,00
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.000.000.000,00	900.000.000,00
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.000.000.000,00	0,00
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.000.000.000,00	9.907.608.600,00
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	10.000.000.000,00	8.304.558.680,00
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0,00	34.359.032.368,00
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	370.000.000.001,00	232.306.874.342,00
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0,00	450.000.000,00
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.000.000.000,00	4.600.000.000,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0,00	1.000.000.000,00
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	5.000.000.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	8.428.950.139,00
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.930.266.000,00	5.778.464.000,00
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.916.736.000,00	1.333.771.204,00
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	631.120.000,00	760.228.796,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	9.240.357.437,00
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	0,00	901.555.920,00
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.000.000.000,00	700.000.000,00
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	33.453.560.000,00	18.400.000.000,00
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	0,00	300.000.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	8.766.357.437,00
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	0,00	500.000.000,00
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	7.000.000.000,00	3.400.000.000,00
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	4.000.000.000,00	1.600.000.000,00
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	0,00	16.500.000.000,00
2	07	06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	400.000.000,00	600.000.000,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.350.000.000,00	150.000.000,00
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	0,00	150.000.000,00
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0,00	200.000.000,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	250.000.004,00	1.750.000.000,00
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	452.423.000,00	750.000.000,00
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	250.000.000,00	0,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
2	10	03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	150.000.000,00	0,00
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	0,00	1.250.000.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	10	07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	250.000.000,00	0,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	29.467.460.193,00
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	500.000.003,00	750.000.000,00
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	500.000.000,00	0,00
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	400.000.000,00	250.000.000,00
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	814.009.000,00	0,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	9.781.948.422,00
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	0,00	3.559.074.056,00
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.000.000.000,00	288.715.640,00
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	837.560.000,00	0,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	207.280.000,00
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	666.092.000,00	1.799.999.304,00
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	0,00	502.770.000,00
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	0,00	495.415.000,00
2	13	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT	4.000.000.001,00	3.404.709.600,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0,00	2.340.667.590,00
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	14.186.973.000,00	395.748.000,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	8.280.544.768,00
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	83.738.240.000,00	7.554.152.000,00
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	15.700.920.000,00	10.210.000.000,00
2	15	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	0,00	500.000.000,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	7.904.357.437,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	0,00	1.000.000.000,00
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	17.365.317.000,00	9.746.105.000,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	10.773.692.253,00
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	869.725.000,00	500.024.805,00
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	974.317.001,00	0,00
2	17	07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.000.000.000,00	999.810.180,00
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	7.000.000.002,00	500.165.135,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	7.120.457.644,00
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.500.000.001,00	1.100.000.000,00
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.500.000.000,00	3.550.000.000,00
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.000.000.002,00	1.040.000.000,00
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0,00	850.000.000,00
2	18	07	PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	0,00	460.000.000,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	8.351.685.214,00
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	0,00	2.506.941.800,00
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	0,00	4.199.957.700,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	0,00	200.000.000,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	0,00	100.000.000,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	0,00	3.000.000.000,00
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	0,00	3.500.000.000,00
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0,00	807.701.919,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	15.055.783.431,00
3	25	02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	0,00	30.917.100.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	17.732.150.001,00	11.320.000.000,00
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.241.251.002,00	0,00
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	10.080.000.000,00
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	177.322.002,00	300.000.000,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.000.000.000,00	2.750.014.000,00
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.000.000.000,00	4.293.034.500,00
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.000.000.000,00	0,00
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	932.529.001,00	2.250.052.000,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.000.000.000,00	3.300.000.000,00
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	500.000.000,00	3.500.000.000,00
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	260.000.000,00	500.000.000,00
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	260.000.001,00	0,00
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	260.933.001,00	550.000.000,00
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		
3	28	02	PROGRAM PERENCANAAN HUTAN	0,00	695.000.000,00
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	15.000.000.003,00	4.612.658.000,00
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.500.000.002,00	1.782.096.845,00
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
3	29	02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	0,00	850.000.000,00
3	29	03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1.200.000.001,00	910.000.000,00
3	29	04	PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI	2.000.000.000,00	350.000.000,00
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	0,00	890.000.000,00
3	29	06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	40.000.000.000,00	26.000.000.000,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	0,00	150.000.000,00
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	500.000.000,00	1.500.000.000,00
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	635.745.000,00	3.218.000.000,00
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	397.129.000,00	0,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.000.000.000,00	150.000.000,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
3	31	02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	226.644.002,00	5.749.999.880,00
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	0,00	250.000.000,00
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
3	32	02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	0,00	2.450.000.000,00
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0,00	2.550.000.000,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	01		SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	101.324.645.700,00
4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.500.000.001,00	2.500.000.000,00
4	01	03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	0,00	14.150.000.000,00
4	01	04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	54.000.000.000,00
4	01	05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	0,00	2.000.000.000,00
4	01	06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	0,00	2.100.000.000,00
4	01	07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0,00	2.500.000.000,00
4	01	08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0,00	300.000.000,00
4	01	12	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA BARAT	0,00	50.350.000.000,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	54.084.485.631,00
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	3.104.711.000,00	44.346.869.800,00
4	02	05	PROGRAM SEKRETARIAT DPRD PAPUA BARAT	0,00	799.000.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	01		PERENCANAAN		
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	9.912.741.916,00
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	8.091.693.000,00	4.350.000.000,00
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15.027.429.000,00	4.500.000.000,00
5	02		KEUANGAN		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	49.547.937.155,00
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	786.299.835.000,00	260.230.073.717,00
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	0,00	2.500.000.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.163.149.001,00	5.600.000.250,00
5	03		KEPEGAWAIAN		
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	9.955.912.022,00
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	6.000.000.000,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	1.000.000.000,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	850.000.000,00
5	05	03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	0,00	350.000.000,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6	01		INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	9.324.174.897,00
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	0,00	7.000.000.000,00
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	0,00	5.500.000.000,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	7.205.746.151,00
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0,00	1.000.000.000,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0,00	414.648.000,00
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0,00	700.000.000,00
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0,00	500.000.000,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0,00	1.574.663.385,00
9			UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN		
9	03		KEKHUSUSAN PAPUA BARAT		
9	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	8.637.187.331,00
9	03	02	PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	28.536.366.400,00



yang sah sesuai aslinya,
 Kepala Biro Hukum,
 Anas Nauw S.H., M.H.
 Penjabat Tk. I (IV/b)
 No. 116 200212 2 001

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN
PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode				Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	14.503.547.102,05	14.980.097.928,00	14.980.097.928,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14.503.547.102,05	14.980.097.928,00	14.980.097.928,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	14.503.547.102,05	14.980.097.928,00	14.980.097.928,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.503.547.102,05	14.980.097.928,00	14.980.097.928,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.580.000,00	127.422.000,00	127.422.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	1.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	1.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	1.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	1.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	1.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	24.842.000,00	24.842.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	1.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.214.998.928,00	14.237.198.928,00	14.237.198.928,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	1.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.119.939.928,00	14.119.939.928,00	14.119.939.928,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	1.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.000.000,00	47.200.000,00	47.200.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	1.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	1.02	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	25.059.000,00	25.059.000,00	25.059.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000p	1	01	1.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Kode				Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
9.03.0.00.0.00.01.0000	9	03	01	1.05	0003	8.000.000,00	8.000.000,00
9.03.0.00.0.00.01.0000	9	03	01	1.05	0004	48.966.000,00	48.966.000,00
9.03.0.00.0.00.01.0000	9	03	01	1.05	0008	18.880.000,00	18.880.000,00
9.03.0.00.0.00.01.0000	9	03	01	1.05	0009	463.232.000,00	463.232.000,00
9.03.0.00.0.00.01.0000	9	03	01	1.08		346.232.000,00	346.232.000,00
9.03.0.00.0.00.01.0000	9	03	01	1.08	0002	70.544.000,00	70.544.000,00
9.03.0.00.0.00.01.0000	9	03	01	1.08	0004	275.688.000,00	275.688.000,00
9.03.0.00.0.00.01.0000	9	03	01	1.09		1.055.490.000,00	1.055.490.000,00
9.03.0.00.0.00.01.0000	9	03	01	1.09	0001	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00
9.03.0.00.0.00.01.0000	9	03	01	1.09	0011	5.490.000,00	5.490.000,00
TOTAL					1.687.253.539.361,00	1.693.424.915.206,00	1.722.942.016.206,00

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD



PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	593.746.000,00	171.000.000,00	0,00	0,00	764.746.000,00
2	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	3.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000.000,00
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.343.874.600,00	156.125.400,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
4	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	9.746.105.000,00	0,00	0,00	0,00	9.746.105.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
5	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
6	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	999.810.180,00	0,00	0,00	0,00	999.810.180,00
7	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
8	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	500.165.135,00	0,00	0,00	0,00	500.165.135,00
9	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
10	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	573.538.400,00	33.785.493.988,00	0,00	0,00	34.359.032.368,00
11	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	52.368.000,00	9.855.240.600,00	0,00	0,00	9.907.608.600,00
12	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00
13	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1.181.000.000,00	11.211.096.000,00	0,00	0,00	12.392.096.000,00
14	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	111.464.000,00	8.193.094.680,00	0,00	0,00	8.304.558.680,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
15	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	4.741.704.653,00	227.565.169.689,00	0,00	0,00	232.306.874.342,00
17	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	4.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000.000,00
18	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.470.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	7.470.000.000,00
19	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	16.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
20	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
21	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.802.000.000,00	598.000.000,00	0,00	0,00	3.400.000.000,00
22	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00
23	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
25	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT DAYA	1.055.490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.055.490.000,00
26	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA BARAT	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT DAYA	4.669.848.000,00	0,00	0,00	0,00	4.669.848.000,00
27	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	832.000.000,00	11.744.000,00	0,00	0,00	843.744.000,00
28	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
29	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
30	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BIRO PEREKONOMIAN DAERAH	1.900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
31	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	2.714.609.800,00	0,00	0,00	0,00	2.714.609.800,00
32	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
33	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	500.024.805,00	0,00	0,00	0,00	500.024.805,00
34	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
35	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
36	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
37	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
38	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGELOLOGIAN	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00
39	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	890.000.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000.000,00
40	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	392.734.000,00	25.607.266.000,00	0,00	0,00	26.000.000.000,00
41	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	310.000.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000.000,00
42	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
43	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.397.043.200,00	52.956.800,00	0,00	0,00	2.450.000.000,00
44	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT DAYA	190.910.000,00	0,00	0,00	0,00	190.910.000,00
45	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	495.415.000,00	0,00	0,00	0,00	495.415.000,00
46	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	390.100.000,00	0,00	0,00	0,00	390.100.000,00
47	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	502.770.000,00	0,00	0,00	0,00	502.770.000,00
48	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	795.127.750,00	120.547.400,00	0,00	0,00	915.675.150,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
49	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.200.456.250,00	17.543.750,00	0,00	0,00	3.218.000.000,00
50	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
51	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.999.999.880,00	0,00	0,00	0,00	4.999.999.880,00
52	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
53	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
54	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
55	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	6.840.000,00	993.160.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
56	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	460.000.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
57	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.040.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000.000,00
58	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00
60	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000.000,00
61	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000.000,00
62	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN	264.152.000,00	3.450.000.000,00	0,00	0,00	3.714.152.000,00
63	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00
64	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.245.000.000,00	7.835.000.000,00	0,00	0,00	10.080.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
65	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	26.701.900.000,00	4.215.200.000,00	0,00	0,00	30.917.100.000,00
66	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000.000,00
68	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	483.406.000,00	16.594.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00
69	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
70	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00
71	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00
72	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000.000,00
73	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
74	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PERBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	18.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.400.000.000,00
76	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL, PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
77	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	INSPEKTORAT DAERAH	6.418.614.897,00	0,00	0,00	0,00	6.418.614.897,00
78	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
79	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT DAYA	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
80	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00
81	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
82	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00
83	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
87	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
90	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demckrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demckrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
92	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demckrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00
93	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demckrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	5.750.000.000,00	0,00	0,00	5.750.000.000,00
94	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demckrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT DAYA	27.987.391.600,00	0,00	0,00	0,00	27.987.391.600,00
95	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demckrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT DAYA	37.435.349.504,00	0,00	0,00	0,00	37.435.349.504,00
96	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demckrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA BARAT	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT DAYA	23.866.518.400,00	0,00	0,00	0,00	23.866.518.400,00
97	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
98	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
99	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.928.080.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	1.926.080.000,00
100	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	1.997.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
101	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	12.760.399.748,00	240.000.000,00	8.420.790.956,00	238.808.883.013,00	260.230.073.717,00
102	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	5.600.000.250,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000.250,00
103	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	47.513.375.155,00	218.922.000,00	0,00	0,00	47.732.297.155,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
104	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	1.750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000.000,00
105	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000.000,00
106	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	7.962.741.916,00	0,00	0,00	0,00	7.962.741.916,00
107	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00
108	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
109	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	760.228.796,00	0,00	0,00	0,00	760.228.796,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
110	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.288.892.639,00	0,00	0,00	0,00	8.288.892.639,00
111	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENATAAN DESA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	403.385.000,00	1.396.614.304,00	0,00	0,00	1.799.999.304,00
112	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	3.559.074.056,00	0,00	0,00	0,00	3.559.074.056,00
113	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	288.715.640,00	0,00	0,00	0,00	288.715.640,00
114	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	7.858.997.437,00	45.360.000,00	0,00	0,00	7.904.357.437,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
116	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
117	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10.674.750.653,00	98.941.600,00	0,00	0,00	10.773.692.253,00
118	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00
119	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	144.688.296.796,00	3.740.000.000,00	0,00	0,00	148.428.296.796,00
120	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.565.000.000,00	935.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
121	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	15.269.939.928,00	784.000.000,00	0,00	0,00	16.053.939.928,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
122	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.421.976.800,00	60.000.000,00	0,00	0,00	1.481.976.800,00
123	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	901.555.920,00	0,00	0,00	0,00	901.555.920,00
124	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
125	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
126	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
127	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	INSPEKTORAT DAERAH	2.698.870.000,00	206.690.000,00	0,00	0,00	2.905.560.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
128	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	10.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000.000,00
129	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA BARAT	SEKRETARIAT DAERAH	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00
130	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	SEKRETARIAT DAERAH	92.474.645.700,00	0,00	0,00	0,00	92.474.645.700,00
131	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT DAYA	3.383.857.000,00	0,00	0,00	0,00	3.383.857.000,00
132	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT DAYA	6.996.992.087,00	0,00	0,00	0,00	6.996.992.087,00
133	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM SEKRETARIAT DPRD PAPUA BARAT	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT DAYA	799.000.000,00	0,00	0,00	0,00	799.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
134	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPIA BARAT DAYA	7.581.697.331,00	0,00	0,00	0,00	7.581.697.331,00
135	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00
136	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI KHUSUS, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00
137	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.083.771.204,00	0,00	0,00	0,00	1.083.771.204,00
138	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENINGKATAN KETERITERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.778.464.000,00	0,00	0,00	0,00	5.778.464.000,00
139	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	140.057.500,00	0,00	0,00	0,00	140.057.500,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
140	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
141	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT DAYA	1.955.703.940,00	0,00	0,00	0,00	1.955.703.940,00
142	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.029.832.022,00	0,00	0,00	0,00	8.029.832.022,00
143	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	BIRO ORGANISASI	2.304.000.000,00	196.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
144	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI KHUSUS, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000.000,00
145	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
146	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	8.308.807.272,00	0,00	0,00	0,00	8.308.807.272,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
147	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	10.781.194.656,00	158.836.200,00	0,00	0,00	10.920.030.856,00
148	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.530.783.431,00	43.023.200,00	0,00	0,00	13.573.806.631,00
149	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT DAERAH	5.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000.000,00
150	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT DAERAH	5.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000.000,00
151	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT DAYA	12.784.711.200,00	0,00	0,00	0,00	12.784.711.200,00
152	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT DAYA	7.496.440.100,00	0,00	0,00	0,00	7.496.440.100,00
TOTAL				862.812.715.031,00	353.829.619.594,00	8.420.790.956,00	238.808.883.013,00	1.463.872.008.591,00

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA'AD



Dr. Anape Nauw, S.H., M.H.
Penyina Tk. I (IV/b)
21116 200212 2 001